

Executife Summary

STUDI TERHADAP MUNCULNYA GERAKAN ISLAM FUNDAMENTAL DAN ISLAM LIBERAL DI INDONESIA

Istilah fundamentalisme sebenarnya pertama kali muncul pada kalangan penganut Kristen (Protestan) di Amerika Serikat (AS), sekitar tahun 1910-an. Nama fundamentalisme digunakan mereka untuk membedakan kelompoknya dengan kaum Protestan yang liberal yang menurut mereka telah merusak keimanan Kristen. Kelompok ini ingin menegakkan kembali dasar-dasar (fundamental) tradisi Kristen, suatu tradisi yang mereka definisikan sebagai pemberlakuan panafsiran harfiah terhadap kitab suci serta penerimaan doktrin-doktrin inti tertentu. Teori evolusi Darwin adalah klimaks dari reaksi kelompok ini.

Hingga saat ini perbincangan tentang fundamentalisme agama masih saja mengemuka, terutama karena paham ini dapat dengan mudah dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan terorisme. Fundamentalisme pun cenderung dimaknai secara peyoratif dengan ciri eksklusif, absolutis, merasa paling benar dalam memahami sesuatu, dan melakukan hal yang terkadang bertentangan dengan arus utama. Tentu kalangan yang digelari paham ini merasa bangga karena mereka memaknainya sebagai sebuah ketaatan yang paling mendekati kesempurnaan ajaran Tuhan dan pemahaman tekstual terhadap kitab suci adalah paling benar.

Namun, fenomena fundamentalisme tidak berhenti hanya pada gejala perdebatan interpretasi antara kaum skripturalis dan modernis-liberal, tetapi

juga berimplikasi pada sikap antipati keras yang dilakukan oleh kelompok yang pertama disebut. Dalam Islam, kelompok fundamentalis kerap kali diidentikkan dengan golongan anti-Barat. Fundamentalisme Islam pun dikenal, terutama di kalangan Barat, sebagai teroris yang sewaktu-waktu bertindak mengejutkan. Peristiwa dahsyat 11 September 2001 lalu adalah contohnya. Dalam konteks peristiwa terorisme internasional, fundamentalisme Islam yang semula dipahami sebagai gejala perbedaan interpretasi teologis hendaknya juga dipahami sebagai sebuah upaya dedominasi geopolitik Barat atas Islam.

Secara faktual, fundamentalisme adalah kenyataan global dan muncul pada semua keyakinan sebagai respon atas masalah-masalah yang dimunculkan modernitas. Tak terkecuali dalam Islam, paham ini pun berkecambah luas di berbagai agama: Judaisme, Kristen, Hindu, Sikh, dan bahkan Konfusianisme. Gerakan fundamentalis memang tidak muncul begitu saja sebagai reaksi spontan terhadap gerakan modernisasi yang dinilai telah keluar terlalu jauh, tetapi lahir seiring dengan ditempuhnya cara ekstrim ketika jalan moderat dianggap tidak membantu. Dengan demikian, fundamentalisme Islam hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik internasional dengan masing-masing latar belakang lebih pada ideologi politis. Dalam pandangan Bassam Tibi, fundamentalisme merupakan gejala ideologis dari ide *clash of civilizations* (benturan peradaban). Gejala ini bukan disebabkan krisis yang melanda dunia saat ini, tetapi lebih-lebih muncul baik dari ekspresi krisis tersebut maupun respon atasnya.

Penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah untuk mengkaji fundamentalisme dan Liberalisme Islam sebagai suatu ‘gerakan sosial dan pemikiran Islam’ yang kemudian dihubungkan dalam konteks pemikiran Islam radikal. Hal ini dimaksudkan bahwa karena belakangan ini, nalar kesadaran para pemikiran Islam sering dibenturkan dengan berbagai label Islam yang diikuti dengan nama seperti “fundamentalis”, “militan”, “radikal”, “teroris”, “modernis”, “liberalis”, dan “sekularis”, dan lain-lain. Singkatnya, berbagai nama tersebut sudah sangat umum dipakai dalam mengkaji dan mengulas Islam moderen. Bahkan, isu “fundamentalisme Islam” telah menyedot perhatian, jauh sebelum Perang Dingin (*the Cold War*) berakhir.

1. Bagaimana Pengertian dan pemahaman tentang Islam fundamental dan Islam Liberal dalam konteks gerakan radikalisme Islam di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi gerakan Islam Fundamental dan Islam Liberal dalam konteks pemikiran Islam Indonesia?

Informasi dan data tentang “gerakan fundamentalisme dan Islam Liberal dalam konteks gerakan radikalisme agama di Indonesia ini diperoleh dari dua sumber : *Pertama* adalah sumber bibliografis dan dokumentasi, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel karya ilmiah yang dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian yang sebagian besar diambil dari internet, dan sebagian data diambil dari sejumlah buku dari berbagai penerbit.. Sumber data ini akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis fenomena fundamentalisme, Liberalisme,

dan radikalisme agama. Semua data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber-sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini, yang diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan realitas gejala fundamentalisme, liberalisme, dan radikalisme agama secara lebih obyektif dan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis atas dasar model-model sosiologis yang ada yang membicarakan nexus antara agama dan modernitas. Dengan pendekatan ini, Penulis berusaha menelusuri aspek-aspek fenomena fundamentalisme dan liberalisme agama, sehingga dapat dipetakan profil institusional dari pemikiran fundamental dan liberalisme agama.

Dalam pemikiran Islam, misalnya, terdapat aliran-aliran yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam bidang politik, aqidah, maupun fiqih. Perbedaan tersebut secara potensial dapat menimbulkan konflik sosial dimasyarakat yang dapat mengarah pada perpecahan bangsa. Disintegrasi yang menurut Koentjoro Ningrat salah satu keanekaragaman masyarakat bangsa Indonesia yang harus dipikirkan berkenaan dengan usaha menciptakan integrasi nasional adalah masalah hubungan antar umat beragama.

Peter L. Berger (1991) mengungkapkan secara historis agama merupakan salah satu legitimasi yang paling efektif. Kemajemukan agama (*Religious Plurality*) merupakan potensi melahirkan atau membangkitkan konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Konflik-konflik sosial yang bersumber dari agama seringkali mewarnai kehidupan masyarakat. Tetapi sebenarnya bukan karena semata-mata dilatarbelakangi oleh agama itu sendiri,

melainkan konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu, misalnya perebutan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan lain seperti perebutan sumberdaya ekonomi dan lain sebagainya. Konflik yang demikian juga bisa muncul melalui pemeluk agama yang mempunyai faham keagamaan tertentu pada aliran-aliran tertentu pula. Misalnya pemahaman radikalisme agama di Indonesia yang kian lagi booming.

Fundamentalisme Islam, sesungguhnya, bukanlah istilah yang *genuine* dan lahir dari 'rahim' kosa kata masyarakat Muslim. Istilah Fundamentalisme, pada awalnya, dimunculkan oleh kalangan akademisi Barat sendiri dalam konteks sejarah keagamaan dalam masyarakat Barat sendiri. Fundamentalisme, karenanya, adalah reaksi dan negasi terhadap modernisme. Fundamentalisme dianggap sebagai aliran yang berpegang teguh pada "fundamen" agama Kristen melalui penafsiran terhadap kitab suci agama itu secara *rigid* dan literalis.

Karena itu, kalangan Muslim tertentu berkeberatan dengan penggunaan istilah "fundamentalisme", dengan alasan bahwa konteks historis istilah ini berawal dari "fundamentalisme" Kristen. Atas dasar inilah maka sebagian mereka menggunakan istilah *ushuliyyun* untuk menyebut "orang-orang fundamentalis", yakni mereka yang berpegang kepada fundamen-fundamen pokok Islam sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam kaitan ini pula digunakan istilah *al-Ushuliyyah al-Islamiyyah* (fundamentalis Islam) yang mengandung pengertian; kembali kepada fundamen-fundamen keimanan; penegakan kekuasaan politik ummah; dan pengukuhan dasar-dasar

otoritas yang absah (*syar'iyah al-hukm*). Formulasi ini, seperti terlihat, menekankan dimensi politik gerakan Islam, ketimbang aspek keagamaannya.

Ciri fundamentalisme sebagai aliran yang lebih mengutamakan “slogan-slogan revolusioner” dari pada pengungkapan gagasan secara terperinci, diutarakan oleh Hrair Dekmejian. “Jihad” dan “menegakkan hukum Allah” adalah slogan yang utama bagi kaum fundamentalis. Selanjutnya, menurut Dekmejian, kaum fundamentalis lebih cenderung bersikap doktriner dalam menyikapi persoalan yang dihadapi, namun kurang berusaha memikirkan segi-segi praktis yang secara implementatif dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya.

Istilah "Islam Liberal" pertama kali digunakan oleh para penulis Barat seperti Leonard Binder¹ dan Charles Kurzman.² Namun dalam konteks Indonesia ada buku khusus yang ditulis oleh Greg Barton pada tahun 1995 mengenai kemunculan pemikiran liberal di kalangan pemikir Indonesia.³ Buku ini kemudiannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tajuk "*Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neomodernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdunahman Wahid*", yang diterbitkan atas kerjasama Paramadina, Yayasan Adikarya Ikapi, dan Ford Foundation pada tahun 1999. Pemikiran Islam liberal, yang biasa disingkat sebagai 'Islib', kemudian dipopularkan oleh satu kumpulan para pemuda dengan menubuhkan satu rangkaian kerjasama di dalam dan di luar negara, yang mereka namakan sebagai 'Jaringan Islam Liberal'.

Islam Liberal bagi Kurzman sama seperti kaum pembaharuan yang menyerukan kepada modernitas dan meninggalkan keterbelakangan masa lalu serta menyerukan kepada pengembangan teknologi, ekonomi, demokrasi, dan hak-hak resmi. Para tokoh pembaharuan yang disebut-sebut berpengaruh adalah Muhammad bin Abdul Wahhab dari Arab Saudi, Syaikh Jibril bin Umar al-Aqdisi dari Afrika Barat, Haji Miskin dari Sumatra, Haji Syariat Allah dan Ahmed Brelwi dari Asia Selatan dan Ma Ming Xin dari Cina. Tetapi, pengaruh Islam Liberal yang paling kuat dari pembaharuan India yang bernama Shah Wali Allah Addahlawi (1703-1762). Sedangkan Montgomery Watt memandang bahwa Islam Liberal bermula pada abad ke-19 sampai masa kemerdekaan (1945).

Ketidakpuasan-ketidakpuasan politik, ekonomi, urbanisasi, krisis moral dan seksualitas di dunia moderen, menjadi faktor-faktor yang signifikan bagi kelahiran gerakan-gerakan fundamentalisme Islam di seluruh dunia Muslim. Selanjutnya, yang patut digaris bawahi bahwa gambaran utama dari kebangkitan gerakan Islam (*Islamic Movements*) adalah gagasan mengenai “*political Islam*”.

Sejalan dengan meningkatnya proses modernisasi dan globalisasi, kebijakan marginalisasi Islam politik tampaknya tidaklah bisa dipertahankan terus-menerus oleh negara. Ada saat-saat ketika negara mengalami apa yang disebut krisis legitimasi, yang semakin meluas sejak awal 1990-an. Krisis itu terjadi terutama ketika janji-janji modernisasi dan pembangunan gagal dipenuhi oleh negara. Untuk mencegah meluasnya krisis legitimasi itu, negara harus

mencari pilar-pilar dukungan dan strategi baru. Di antaranya, negara menjalankan jurus yang oleh Olivier Roy, seorang ilmuwan politik Perancis, disebut “Islamisasi konservatif” (conservative Islamisation), yang terutama diarahkan pada penonjolan simbol-simbol agama di dalam wacana publik dan kenegaraan serta mengakomodasi kekuatan-kekuatan sosial-politik keagamaan. Bermunculanlah organisasi-organisasi, institusi-institusi dan berbagai hal lainnya yang bersimbolkan Islam.

Fundamentalisme Islam Indonesia direpresentasikan oleh gerakan islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, Laskar Jihad, Forum Ukhuwah Umat Islam (FKUI), Kelompok Tarbiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, MUI dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerakan Islam ini menawarkan Syari’at Islam sebagaimana yang mereka pahami sebagai solusi untuk mengatasi problem kebangsaan. Mereka sepekat bahwa akar dari keterpurukan bangsa Indonesia adalah lepasnya akar tunjang akidah dan syariat Islam dalam kehidupan bangsa, khususnya kaum muslim Indonesia sebagai kelompok mayoritas di negeri ini

Bagi Islam fundamentalis Al-Quran dan as-Sunnah adalah *the way of life* yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pandangan mereka terhadap teks-teks agama (*nash*) terkesan sangat tekstual dan *rigid*. Sehingga para pengamat islam mendefinisikan mereka sebagai skripturalisme. Rujukan mereka dalam memahami Islam tidak lepas dari pemahaman ulama terdahulu (*salaf*) seperti Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab,

Ahmad bin Hambal dan seluruh tokoh ulama salaf yang dikelompokkan sebagai Ahlul Hadis.

Liberalisme Islam di Indonesia ini memang belum menunjukkan ekspresi intelektual keislaman yang mandiri. Mereka lebih mengeksplorasi pemikiran Islam liberal yang diimpor dari dunia Islam lain. Tokoh-tokoh Islam liberal seperti Musthafa Abdul Raziq, Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, Hasan Hanafi, Nashr Abu Zaid, Hasan Hanafi, Muhammad Abeed al-Jabiri, dan Abdul Karim Soroush merupakan idola mereka. Tidak jarang artikulasi intelektualitas gerakan liberalisme Islam Indonesia ini merepresentasikan pemikiran para tokoh pemikir muslim liberal tersebut.

Liberalisme Islam Indonesia berorientasi pada ranah kultural. Mereka mengkonsolidasikan gagasan-gagasannya melalui forum-forum ilmiah dan media massa. Mereka agak kurang tertarik dalam wilayah politik. Mereka menjaga jarak dengan kekuatan-kekuatan politik praktis. Seringkali respon mereka terhadap realitas sosial terkesan senafas dengan agenda liberalisasi ekonomi dan politik di negeri ini. Isu demokratisasi, HAM, kebebasan ekspresi dan sistem ekonomi berdasarkan mekanisme pasar bebas merupakan contoh nyata relasi mereka agenda liberalisasi politik dan ekonomi itu. Sehingga kalangan fundamentalis Islam menuding mereka sebagai antek-antek kapitalisme internasional, atau intelektual muslim yang sudah teracuni pemikiran Barat.

Kelompok fundamentalisme Islam atau Islamis radikal terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang bersifat nasional dan regional, yang

bergerak dalam satu negara (nasional) dan beberapa negara (regional) tertentu. Kedua, kelompok yang bersifat transnasional atau supranasional yang tidak terikat kepada negara tertentu. Kelompok ini dikenal pula dengan nama neofundamentalis, neoislamis, dan jihadis. Kaum fundamentalisme Islam atau Islam radikal umumnya menganggap demokrasi sebagai sistem kufr, kafir. Berdasarkan prinsip ini, mereka semula mengharamkan mengambil dan menerapkan sistem demokrasi.